



**RENCANA KERJA
BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2024.

Rencana Kerja disusun berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada Rencana Strategi BNN RI 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian visi misi BNN RI.

Palangka Raya, Januari 2024
Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr. Joko Setiono, SH., SIK., M.Hum.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum Permasalahan Narkoba

Penyusunan Rencana Kerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dimana setiap kementerian lembaga dan satuan kerja mandiri wajib menjabarkan dan mengoperasionalkan rencana strategisnya selama setahun.

BNN Provinsi Kalimantan Tengah sebagai perpanjangan tangan BNN RI dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menyusun Rencana Kerja TA.2024. Rencana Kerja ini disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan karena menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, dan harmonisasi Renproja ke dalam langkah-langkah yang lebih konkrit dan terukur.

Berdasarkan survey yang dilakukan BNN bersama BRIN tahun 2023, angka prevalensi di Indonesia mengalami penurunan, dari 1,95 % tahun 2021 menjadi 1,73% tahun 2023. Prevalensi 1,73 artinya dari 10.000 orang penduduk Indonesia usia 15-64 tahun terdapat 173 orang terpapar narkoba dalam kurun 12 bulan terakhir atau setara dengan 3,33 juta jiwa. Adapun Jenis Narkoba yang paling banyak dipakai yaitu : Ganja dan Shabu.

Permasalahan narkoba yang semakin meningkat di Provinsi Kalimantan Tengah ditunjukkan oleh banyaknya informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik di daerah maupun di pedesaan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kawasan

pertambahan dan perkebunan berpengaruh pada masyarakat sekitar dan internal perusahaan. Ini tentunya akan menambah kawasan rawan narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan pada tahun 2023 BNN Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mengumpulkan barang bukti narkoba sebanyak $\pm 11,2$ kg. Ini menunjukkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah telah demikian hebatnya. Kondisi ini memerlukan kepedulian dari masyarakat dan pemulihan kawasan rawan narkoba.

Proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 BNN Provinsi Kalimantan Tengah memperhatikan kondisi kerawanan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan di BNN Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023, serta berbagai permasalahan terkini yang dihadapi BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran.

2. Kondisi Capaian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2023

Penetapan Kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 menetapkan sebanyak 13 sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 19 indikator. Berikut evaluasi Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2023. Membahas mengenai perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan, berikut penjabarannya :

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah Provinsi sebanyak **2 kabupaten**; meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah Provinsi sebanyak **2 kabupaten**; meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori "mandiri" di wilayah Provinsi sebanyak **2 kabupaten** dan meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan dua indikator

kinerja yakni jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari “bahaya” menjadi waspada sebanyak **1 kawasan** dan nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi sebesar **2,97**.

Bidang Rehabilitasi memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja yaitu meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan indikator kinerja persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami kualitas hidup sebesar **71,43%**; meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dengan dua indikator kinerja yakni jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sebanyak **30 orang** dan jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis sebanyak **5 orang**; meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dengan dua indikator kinerja yakni jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi sebanyak **2 lembaga** dan indikator kinerja jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional sebanyak **8 unit**; dan meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah **3,81**.

Bidang Pemberantasan memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dengan indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 sebesar **26 berkas perkara** dan meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba dengan indikator kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban sebesar **100** indeks dan kesehatan tahanan dan nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba sebesar **100** indeks.

Bagian Umum selaku penanggungjawab manajemen organisasi memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu : meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien dengan dua indikator kinerja yakni nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah sebesar **85,41** dan indikator kinerja jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan **Nilai Kinerja Anggaran mencapai target sebanyak 1 kabupaten/kota**; meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai

prosedur dengan dua indikator kinerja yakni nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Tengah sebesar **97,86** dan indikator kinerja jumlah **BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target sebanyak 2 kabupaten/kota**; dan meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal dengan satu indikator kinerja yakni nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal dengan nilai **83,56**.

Berikut tabel realisasi pencapaian sasaran kegiatan tahun 2023 :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase
1	2	3	4	5	6
	penanganan P4GN	berkategori "Mandiri" di wilayah Provinsi			
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100 %
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,97	2,97	100 %
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami kualitas hidup.	63 %	71,43%	113%
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	30 Orang	30 Orang	100%
8	Meningkatnya kapasitas	Jumlah petugas Rehabilitasi yang	3 Orang	5 Orang	166,66%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase
1	2	3	4	5	6
	tenaga teknis rehabilitasi	tersertifikasi kompetensi teknis			
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi	1 Lembaga	2 Lembaga	200%
10	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi	6 Unit	8 Unit	133,33%
11	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika.	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika.	3,4	3,81	112%
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	12 Berkas	26 Berkas	216%
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase
1	2	3	4	5	6
	barang bukti narkotika				
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100%
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah	88	85,41	97,05%
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2 BNN Kabupaten/ Kota	1 BNN Kabupaten/ Kota	50%
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Tengah	92	97,86	106,36%
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2 BNN Kabupaten/ Kota	2 BNN Kabupaten/ Kota	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase
1	2	3	4	5	6
19	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75 Indeks	83,56 Indeks	111,41%

Terdapat 2 (dua) target kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 yang tidak tercapai, namun ada juga beberapa yang melampaui target. Penentuan target kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 memperhatikan beberapa hal di antaranya :

- 1) Capaian target kinerja terakhir yang dievaluasi (tahun 2023).
- 2) Rencana Strategis BNN RI Tahun 2020-2024.
- 3) Dokumen Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024.

3. Identifikasi Potensi dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Narkoba

Pelaksanaan program P4GN di BNN Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia, baik di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota maupun SDM pendukung di stakeholder mitra kerja BNN di daerah masih kurang terlatih untuk beberapa layanan di daerah, terutama pada layanan rehabilitasi. Sehingga menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan program rehabilitasi di daerah.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BNN Provinsi Kalimantan Tengah, seperti: kendaraan operasional, belum terpenuhinya sarana dan prasarana gedung layanan rehabilitasi rawat inap serta fasilitas layanan rehabilitasi rawat jalan yang tersedia belum dapat dikatakan lengkap, juga fasilitas IT yang belum memadai terutama di Bidang Pemberantasan.

3. Terbatasnya tempat rehabilitasi rawat inap di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengakibatkan banyaknya pecandu dan korban penyalahguna narkoba tidak mendapatkan akses rehabilitasi sesuai hasil assesment termasuk yang sudah menjalani TAT sehingga lapas/rutan *over capacity*. Selain itu belum tersedianya anggaran untuk pengantaran pecandu dan/atau korban penyalahguna yang sudah *inchrah* ke balai rehabilitasi di luar Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Stigma negatif yang masih kental di masyarakat terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba sehingga mereka memiliki rasa malu dan takut untuk melaporkan diri secara sukarela serta kurangnya kesadaran orang tua pecandu (orang tua pecandu baru akan bertindak jika anaknya telah menunjukkan hal yang serius, misalnya telah mengalami gejala gangguan mental dan overdosis serta kriminal).
5. Baru terbentuk 2 (dua) BNN Kabupaten/Kota dari 14 (empat belas) kabupaten / kota di Provinsi Kalimantan Tengah menjadikan pelaksanaan P4GN belum maksimal untuk menjangkau seluruh pelosok Provinsi Kalimantan Tengah.
6. BNN Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat melaksanakan program P4GN secara maksimal sampai ke seluruh pelosok Provinsi Kalimantan Tengah mengingat topografi wilayahnya yang sangat luas, keterbatasan anggaran, keterbatasan personel, keterbatasan sarana prasarana, dan belum terbentuknya BNN Kabupaten/Kota pada 12 (dua belas) kabupaten.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

1. Tujuan Organisasi

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

2. Arah Kebijakan Dan Strategi Operasional

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Kalimantan Tengah merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
- 2) Peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
- 3) Pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
- 5) Penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Kalimantan Tengah juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi permintaan narkoba dengan melakukan penyidikan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Meyakinkan pecandu narkoba untuk melakukan rehabilitasi;
- 3) Menangkap pengedar;
- 4) Membentuk kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Strategi BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah diimplementasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat memiliki fungsi untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dalam menjalankan fungsi tersebut, telah menjangkau 406.607 orang pada tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 20% dibanding tahun sebelumnya.

BNN Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pembangunan ketahanan diri remaja dan keluarga dengan melaksanakan kegiatan pencegahan berbasis keluarga dan penguatan karakter anti narkoba pada remaja. berdasarkan pengukuran oleh BNN RI, nilai indeks ketahanan diri remaja anti narkoba (Dektari) Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 53,73 dengan klasifikasi "sangat tinggi". artinya adalah ketahanan diri remaja di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah untuk menolak narkoba sangat tinggi.

Pengukuran ketahanan keluarga anti narkoba (Dektara) di kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan nilai indeks sebesar 88,244 dengan klasifikasi tinggi artinya adalah ketahanan keluarga di kedua kota/kabupaten tersebut untuk menolak narkoba tinggi. Melihat dari nilai indeks ketahanan diri remaja anti narkoba dan ketahanan keluarga anti narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, dapat menjadi modal yang cukup baik untuk mendukung terciptanya Provinsi Kalimantan Tengah Bersinar (bersih narkoba)

Hasil positif tersebut dapat terwujud berkat kerjasama berbagai instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. BNN Provinsi Kalimantan Tengah akan berupaya menduplikasi kegiatan serupa dengan mengajak stakeholder terkait, terutama pemerintah desa, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya desa (dana desa).

Pada tahun 2023, BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran membentuk 6 Desa Bersinar (Bersih Narkoba) baru, sehingga total desa bersinar yang telah dibentuk di Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 21 dan terdapat 122 pemerintah desa dan kelurahan yang memanfaatkan dana desa untuk mendukung P4GN, yaitu: Desa Batu Belaman, Desa Kubu, Desa Petak Bahandang, Kelurahan Palangka, Kelurahan Petuk Ketimpun, Kelurahan Kelampangan, Kelurahan Panarung, Kelurahan Madurejo serta 114 desa/kelurahan di Kabupaten Gunung Mas. terdapat peningkatan dukungan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah desa dibanding tahun sebelumnya. Selain itu BNN Provinsi Kalimantan Tengah juga telah membentuk 17 Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud komitmen pencegahan dan

pemberantasan narkoba di lingkungan pendidikan. Selain itu BNN Provinsi Kalimantan Tengah juga melaksanakan bimbingan teknis *lifeskill* yang bertujuan memberikan keterampilan sebagai alternatif usaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. dengan peningkatan kemampuan ekonomi tersebut diharapkan dapat mencegah keterlibatan masyarakat dalam peredaran gelap narkoba karena alasan ekonomi.

Demi meningkatkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan P4GN, BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah melatih 240 orang penggiat dan relawan P4GN, yang berasal dari Lingkungan Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan. Para penggiat P4GN tersebut juga telah melaksanakan Deteksi Dini penyalahgunaan narkoba melalui tes urine narkoba secara mandiri sebanyak 3.811 orang terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 1.304 orang. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, setiap institusi, dunia usaha dan masyarakat di Kalimantan Tengah dapat melaksanakan P4GN secara mandiri.

2. Fungsi Rehabilitasi

Dalam pelaksanaan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 54 mengamanatkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. rehabilitasi bertujuan untuk mewujudkan kepulihan dari ketergantungan narkotika serta mengembalikan fungsi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Saat ini di wilayah Kalimantan Tengah terdapat 22 lembaga (12 Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah/LRIP dan 10 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat/LRKM) yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi.

Sejak tahun 2016 sampai dengan 2023 jumlah pecandu/penyalahguna narkoba yang direhabilitasi sebanyak 2.982 orang terdiri dari sebanyak 2.010 orang (67%) rawat jalan dan 972 orang (33%) rawat inap.

Tahun 2023 BNN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran merehabilitasi 166 orang klien, terdiri dari 131 orang (79%) rawat jalan dan 35 orang rawat inap/di rujuk (21%). Bila dibuat data terpilah maka diperoleh data sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 154 orang (92%)

sedangkan perempuan sebanyak 12 orang (8%);

- 2) Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi yaitu shabu sebanyak 116 orang (70%) dan paling sedikit zat lainnya (ganja, inhalan, zenith dan zat lain) sebanyak 50 orang (30%);
- 3) Umur paling muda yang mengakses layanan rehabilitasi di berumur 12 tahun, sedangkan yang tertua berumur 64 tahun.
- 4) Bila dilihat dari tingkat pendidikan, yang paling banyak tamat SMA 58 orang (35%) dan yang paling sedikit tidak tamat SD sebanyak 8 orang (5%);
- 5) Berdasarkan jenis pekerjaan, didominasi yang bekerja pada sektor swasta sebanyak 91 orang (55%);
- 6) Berdasarkan domisili, masyarakat dari 11 kabupaten/kota telah mengakses layanan rehabilitasi di BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran.

Klien dengan domisili paling jauh yang mengakses layanan rehabilitasi di BNN Provinsi Kalimantan Tengah adalah dari Kab. Seruyan sebanyak 1 orang klien.

BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 telah membentuk sebanyak 8 unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dengan jumlah Agen Pemulihan (AP) yang dilatih sebanyak 30 orang.

Layanan rehabilitasi rawat jalan BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran pada tahun 2023 memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sangat baik yaitu dengan nilai 3,75 dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 3,624.

Pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN) kurang dari 30 menit merupakan terobosan Bidang Rehabilitasi, tahun 2023 ini BNN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran telah menerbitkan sebanyak 648 SKHPN. dari hasil pemeriksaan didapat 643 orang negatif dan 5 orang positif.

Untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan rehabilitasi, BNN Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini RSUD, serta lembaga rehabilitasi komponen masyarakat (LRKM) dalam mendirikan tempat rehabilitasi di kota/kabupaten

di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. dari hasil kerjasama tersebut saat ini telah diresmikan 3 tempat rehabilitasi LRIP dan 1 LRKM.

Tahun 2023 ini BNN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran melaksanakan program pascarehabilitasi melalui pemantauan dan pendampingan pemulihan terhadap 83 klien, dengan hasil adanya peningkatan kualitas hidup sebesar 73,5%, khususnya pada domain fisik, psikologi dan lingkungan.

Untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia penyelenggara layanan rehabilitasi, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 BNNP Kalimantan Tengah telah melaksanakan pelatihan terhadap petugas rehabilitasi sebanyak 193 orang yang berasal dari lembaga rehabilitasi instansi pemerintah (LRIP) diantaranya RSUD, puskesmas dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dari 193 orang petugas tersebut sebanyak 34 orang diantaranya telah mengikuti Uji Sertifikasi Konselor Adiksi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BNN RI.

BNN Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menyiapkan tempat rehabilitasi rawat inap bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang secara sukarela (*voluntary*) maupun kasus hukum (*compulsory*), dengan jumlah kapasitas 6 tempat tidur.

3. Fungsi Pemberantasan

Sepanjang tahun 2023 BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran berhasil mengungkap 14 kasus tindak pidana narkoba dengan total 26 berkas dan 26 orang tersangka dimana 3 diantaranya adalah oknum narapidana di Lapas. Dari 14 kasus yang berhasil diungkap 6 diantaranya merupakan Jaringan nasional dan 2 Jaringan internasional.

Pada tahun 2023 BNN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran telah berhasil menyita barang bukti narkoba sebanyak 11.178,43 gram sabu dan 519,42 gram ganja. barang bukti lainnya adalah 31 (tiga puluh satu) buah handphone, 2 (dua) unit kendaraan roda dua, dan 3 (Tiga) unit kendaraan roda empat.

BNN Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat bekerja sendiri dalam menuntaskan permasalahan narkoba yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, oleh sebab itu diperlukan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada

serta partisipasi dari masyarakat. BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran telah berkolaborasi dengan melaksanakan berbagai kegiatan seperti:

- 1) Pengungkapan kasus tindak pidana narkoba bersama Polda Kalteng, Kanwil Kemenkumham Kalteng (Lapas), Bea Cukai Palangka Raya.
- 2) Sebagai anggota tim pengawasan orang asing (TIMPORA) dan Anggota Komite Keamanan Bandara
- 3) Membentuk satgas interdiksi bersama pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat serta instansi terkait lainnya. satgas interdiksi bertujuan untuk menekan angka penyelundupan narkoba yang masuk melalui jalur sungai, laut dan udara.

Berbagai strategi telah dilakukan dalam upaya menurunkan angka permintan narkoba, salah satunya adalah dengan membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT). Pada tahun 2023 jumlah kasus narkoba yang masuk dalam proses assesmen yaitu sebanyak 24 klien TAT.

Salah satu kendala yang dihadapi pada pelaksanaan asesmen terpadu di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah rekomendasi tempat layanan rehabilitasi. Dengan terbentuknya Balai Rehabilitasi Adhyaksa di Kabupaten Katingan, Kapuas, Gunung Mas dan Kotawaringin Timur hasil kolaborasi antara Kejaksaan, BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemda setempat diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengimplementasikan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice* bagi penyalah guna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan rencana Kerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan rencana kerja tahunan BNN Kota Palangka Raya, BNN Kabupaten Kotawaringin Barat dan usulan dari Bidang dan Bagian di BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana kerja Tahun 2024 berisikan :

- Target kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah adalah akumulasi target seluruh unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Tengah.
- Pendanaan pada rencana kerja merupakan akumulasi pendanaan seluruh unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Tengah.
- Rencana kerja dan pendanaan telah mempertimbangkan skala prioritas permasalahan narkoba di wilayah Kalimantan Tengah.
- Rencana Kerja dan pendanaan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota memperhatikan struktur kebijakan, struktur organisasi, struktur anggaran dan struktur kinerja secara berjenjang hingga tingkat jabatan terendah.

Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 membutuhkan masukan (input) berupa pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan perincian berdasarkan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, uraian kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada table Kebutuhan Pendanaan BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran Tahun 2024.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Pencapaian target kinerja memungkinkan kita mengidentifikasi sejauhmana kemampuan satker dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra satker, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra satker, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna mencapai sasaran tertentu. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024 yang ditetapkan secara menyeluruh dan terpadu memberikan kesatuan pandangan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, terdiri dari :

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
 - 1) Kegiatan Penyelenggaran Advokasi.
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif.
 - 3) Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi.
 - 4) Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba
 - 5) Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat.
 - 6) Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.
 - 7) Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah.
 - 8) Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat.
 - 9) Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika.
 - 10) Kegiatan Pengelolaan Informasi Edukasi.
2. Program Dukungan Manajemen
 - 1) Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan.
 - 2) Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana dan Sumber Daya.
 - 3) Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN.
 - 4) Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
 - 5) Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan

Adapun kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran untuk tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel Kebutuhan Pendanaan BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan Jajaran Tahun 2024

NO	KODE OUTPUT	KEGIATAN	2024				TOTAL KEBUTUHAN PENDANAAN
			BNN PROVINSI KALTENG	BNN KOTA PALANGKA RAYA	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT		
1	5936	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	183,000,000	65,000,000	65,000,000		313,000,000
2	3247	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	116,000,000	106,000,000	106,000,000		328,000,000
3	3257	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	245,002,000	216,970,000	216,970,000		678,942,000
4	3248	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	71,600,000	-	-		71,600,000
5	3259	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	27,665,000	14,215,000	14,215,000		56,095,000
6	3260	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	393,140,000	108,893,000	115,205,000		617,238,000
7	3256	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	24,560,000	9,490,000	6,625,000		40,675,000
8	3251	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	100,000,000	-	-		100,000,000
9	5354	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	300,000,000	40,000,000	40,000,000		380,000,000
10	3258	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	138,129,000	29,500,000	-		167,629,000
11	3236	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	4,282,127,000	85,404,000	90,246,000		4,457,777,000

12	3237	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	26,750,000	10,800,000	10,800,000	48,350,000
13	3238	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	13,515,000	6,175,000	13,309,000	32,999,000
14	3239	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	2,185,319,000	1,215,244,000	948,210,000	4,348,773,000
15	3979	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	20,000,000	10,000,000	10,000,000	40,000,000
			8,126,807,000	1,917,691,000	1,636,580,000	11,681,078,000

Matriks Rencana Kerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah

Unit Kerja : BNN Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun : 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN
1	2	3	3	4	5	6
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2	Kabupaten/ Kota	Rp. 313.000.000,-
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2	Kabupaten/ Kota	Rp. 328.000.000,-
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	2	Kabupaten/ Kota	Rp.678.942.000,-
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	Kawasan	Rp.76.000.000,-
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	2,5	Indeks	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	30	Orang	Rp.56.095.000,-
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi	1	Lembaga	Rp.617.238.000,-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN
1	2	3	3	4	5	6
	Komponen Masyarakat	fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi			
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	6	Unit	
7.	Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi	3,82	Indeks	Rp.40.675.000,-
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	7	Berkas Perkara	Rp. 380.000.000,-
	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi					Rp.100.000.000,-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	Indeks	Rp. 167.629.000,-
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	Indeks	
10.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi	86	Indeks	Rp.32.999.000,-
			Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2	Kabupaten/ Kota	
11.	Pembinaan Administrasi dan	Meningkatnya tata kelola administrasi	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan	97,96	Indeks	Rp.8.894.900.000,-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN
1	2	3	3	4	5	6
	Pengelolaan Keuangan	keuangan yang sesuai prosedur	Anggaran (IKPA) BNN Provinsi			
			Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	Kabupaten/ Kota	
12.		Meningkatnya pengelolaan reformasi unit kerja vertikal.	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan Penilaian Internal	86	Indeks	Rp.11.681.078.000,-

Palangka Raya, Januari 2024
Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah,



Joko Setono, S.H., SIK., M.Hum.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kerja ini menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah provinsi Kalimantan Tengah, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian di kemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat dioperasionalkan membutuhkan sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana pendanaan. Dari aspek pendanaan jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp.11.681.078.000,-.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	2 lembaga
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	5 Keluarga 2 Desa/Kelurahan
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	1 Kelompok Masyarakat -

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	10 Orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	Layanan Rehabilitasi di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota Layanan SKHPN	55 Orang
				350 Orang
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	11 Lembaga
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2 Lembaga
7.	Pasca-rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi berkelanjutan	20 Orang
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	-	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	2 laporan
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	5 Berkas Perkara

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
10.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	<p>Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan</p> <p>Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika</p>	<p>Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika</p> <p>Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU</p> <p>Layanan asesmen terpadu pelaku tindak pidana narkotika</p>	<p>2 Produk</p> <p>10 Orang</p> <p>15 Orang</p>
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi 2. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target 	<p>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</p> <p>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</p>	<p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p>
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi 2. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target 	Layanan Manajemen Keuangan	12 Bulan